



**PEMERINTAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2021**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana atas berkat rahmat dan hidayahNya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dibuat berdasarkan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan dari Pembuatan Laporan ini adalah untuk melihat sejauh mana kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama Tahun 2021. Selanjutnya, dalam melaksanakan kegiatan tersebut ditemui hambatan dan kendala, namun hambatan dan kendala tersebut bukan menjadi suatu halangan akan tetapi dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan perbandingan serta tolak ukur bagi Badan Kesbangpol dalam pelaksanaan tugas kedepan nantinya.

Akhir kata dalam pembuatan Laporan ini, kami telah berupaya mengerjakan sebaik mungkin, namun disadari masih banyak kekurangan dan kelemahannya.

Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami perlukan. Atas masukannya, diucapkan terima kasih.

Payakumbuh, Februari 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

H. JONI AMIR, S.Sos, M.M
NIP. 19650619 199003 1 003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Stabilitas keamanan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota selama Tahun 2021 secara umum dapat dikatakan kondusif walaupun dalam masa Pandemi Covid-19. Konflik yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota selama Tahun 2021 dapat difasilitasi penyelesaiannya, sehingga tidak banyak berpengaruh terhadap jalannya roda pembangunan maupun pemerintahan. Demikian juga halnya dalam memperkuat ketahanan nasional yaitu dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan telah dilaksanakan peringatan hari bela Negara dan rangkaian peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri merupakan upaya memberdayakan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga memungkinkan terwujudnya Lima Puluh Kota yang madani, beradab dan berbudaya dalam kerangka adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah. Hal tersebut merupakan hak setiap masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, tetapi usaha untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sejahtera dan dinamis “Yang Mantap” berlandaskan Iman dan Taqwa memerlukan kerja sama yang baik dan dinamis dari semua elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas dari lingkungan terkecil sampai lingkungan yang terbesar.

Guna mewujudkan harapan stakeholder maupun masyarakat tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan dan kegiatan Tahun 2021 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021, yang didalamnya memuat tujuan, sasaran dan strategi berupa kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan setiap tahunnya yang secara rinci akan dijabarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan dimaksud, telah didukung anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021, yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 sebesar Rp. 5.516.570.036,- (Lima Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah). Anggaran tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai Rp. 2.421.307.036,-(Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah);
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.145.231.568,- (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
3. Belanja Hibah Rp.898.831.326,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam).
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 51.200.000,- (Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Demikian Ikhtisar Eksekutif ini disusun, untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan kinerja dan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I	: PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. TUGAS DAN WEWENANG.....	2
	C. SUMBER DAYA MANUSIA/PERSONIL.....	7
	D. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI	8
	E. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II	: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
	A. RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....	12
	B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	15
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
	A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	18
	B. HASIL PENGUKURAN KINERJA.....	19
	C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA.....	22
	D. ANALISIS EFISIENSI DALAM PENCAPAIAN SASARAN.....	42
	E. REALISASI ANGGARAN.....	47
BAB IV	: PENUTUP.....	53
	A. KESIMPULAN.....	53
	B. LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG AKAN DATANG.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	7
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....	8
Tabel 2.1	IKU Kesbangpol.....	15
Tabel 3.1	Klasifikasi penilaian.....	18
Tabel 3.2	Hasil pengukuran kinerja.....	19
Tabel 3.3	Capaian kinerja sasaran strategis 1.....	22
Tabel 3.4	Capaian kinerja sasaran strategis 2.....	32
Tabel 3.5	Realisasi fisik dan keuangan Tahun 2021.....	49
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	6
Gambar 3.1	Peringatan Peristiwa gugurnya 9 Syuhada di Titian Dalam.....	23
Gambar 3.2	Peringatan Peristiwa gugurnya 9 Syuhada di Titian Dalam.....	24
Gambar 3.3	Peringatan Peristiwa gugurnya 9 Syuhada di Titian Dalam.....	24
Gambar 3.4	Peringatan Peristiwa gugurnya 9 Syuhada di Titian Dalam.....	25
Gambar 3.5	Peringatan Peristiwa Situjuah.....	25
Gambar 3.6	Peringatan Peristiwa Situjuah.....	26
Gambar 3.7	Peringatan Peristiwa Situjuah.....	26
Gambar 3.8	Peringatan Peristiwa Situjuah.....	27
Gambar 3.9	Peringatan Peristiwa Situjuah.....	27
Gambar 3.10	Peringatan Hari Bela Negara	28
Gambar 3.11	Peringatan Hari Bela Negara	29
Gambar 3.12	Peringatan Hari Bela Negara	29
Gambar 3.13	Peringatan Hari Bela Negara	30
Gambar 3.14	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di Kecamatan Harau.....	36
Gambar 3.15	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di Kecamatan Harau.....	36
Gambar 3.16	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di Kecamatan Harau.....	37
Gambar 3.17	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di Kecamatan Harau.....	37
Gambar 3.18	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di Kecamatan Guguak.....	38
Gambar 3.19	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di Kecamatan Guguak.....	39
Gambar 3.20	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di Kecamatan Guguak.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government, sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi//Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan masing-masing.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu indikator kinerja Utama, RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kinerjanya.
- c. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- d. Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun berikutnya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Sasaran yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu:

- a. Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
- b. Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Sedangkan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Sedangkan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan IV Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten.
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala kabupaten.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi Negara, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala kabupaten.
- e. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tata kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
- f. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tata kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten).

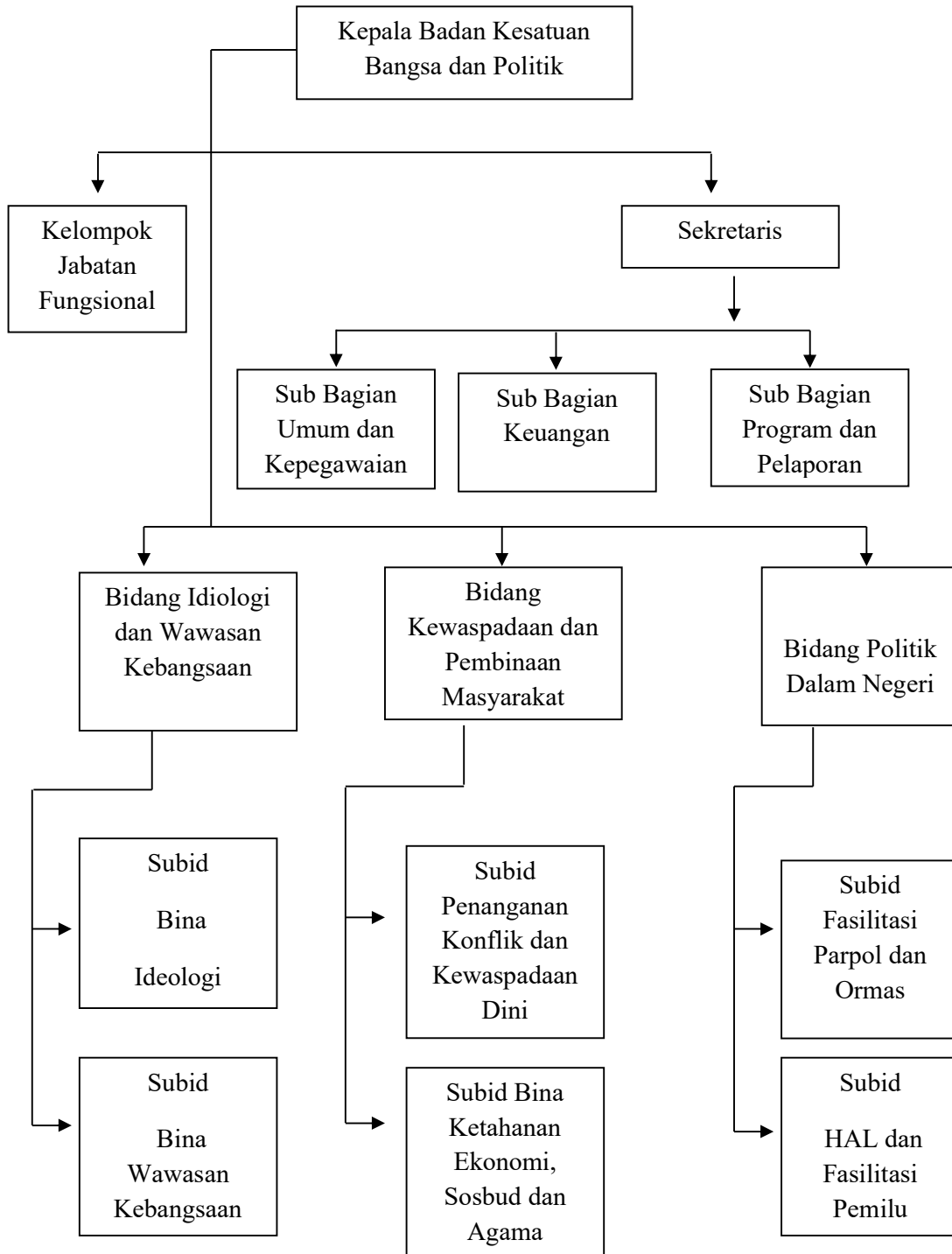
- g. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tata kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
- h. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kebijakan umum nasional, dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
- i. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
- j. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- k. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- l. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.

- m. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- n. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- o. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- p. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- q. Pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) / PERSONIL

Data Tahun 2021 menunjukkan jumlah personil Badan Kesatuan Bangsa berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang, 26 (dua puluh enam) PNS, 1 (satu) orang PTT dan 5 (lima) orang THL, yang terdiri dari:

- a. Jabatan Struktural Eselon II.b sebanyak 1 (satu) orang,
- b. Jabatan Struktural Eselon III.a sebanyak 1 (satu) orang,
- c. Jabatan Struktural Eselon III.b sebanyak 3 (tiga) orang,
- d. Jabatan Struktural eselon IV.a sebanyak 9 (sembilan) orang,
- e. Staf sebanyak 12 (tiga belas) orang,
- f. Pegawai Tidak Tetap sebanyak 1 (satu) orang, dan
- g. Tenaga Harian Lepas sebanyak 5 (lima) orang.

Berdasarkan golongan, jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	1	5	2	-	8
3.	Bidang Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	1	5	-	-	6
4.	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	-	4	1	-	5
5.	Bidang Politik Dalam Negeri	1	3	2	-	6
	Jumlah	4	17	5	-	26

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DIP III	SLTA/ SMK	SLTP	SD	
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	5	1	2	-	-	8
3.	Bidang Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	-	5	-	1	-	-	6
4.	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	-	3		2	-	-	5
5.	Bidang Politik Dalam Negeri	-	4	-	1	1	-	6
6.	Pegawai Tidak Tetap	-	-	-	1	-	-	1
7.	Tenaga Harian Lepas	-	1	-	4	-	-	5
	Jumlah	1	18	1	11	1		32

D. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada urusan Pemerintahan Umum. Secara umum beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam

menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, status kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hingga saat ini belum jelas (diatur dalam ketentuan peralihan) sehingga kewenangan yang menjadi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota belum terukur secara jelas.
- b. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, baik secara kuantitas maupun kualitas.
- c. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas perkantoran.
- d. Belum maksimalnya tugas-tugas internal yang dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas, dan adanya tumpang tindih program/kegiatan dengan OPD lainnya.
- e. Minimnya atau terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan secara berkesinambungan.

Sedangkan identifikasi permasalahan setiap bidang sesuai dengan tupoksi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan pada bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan :
 1. Makin hari rasa berbangsa dan bernegara makin “memudar”.
 2. Makin menurunnya moral dari generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya.
 3. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
 4. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
 5. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral bangsa.

6. Belum terbentuknya lembaga teknis Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
 7. Belum terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Lima Puluh Kota.
 8. Belum terbentuknya Satuan Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
- b. Permasalahan pada kewaspadaan dan pembinaan masyarakat :
1. Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik dan kewilayahan serta rawan akan konflik.
 2. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak social politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat.
 3. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat dalam mengantisipasi budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan nasional.
 4. Masih kurangnya kesamaan persepsi dalam kegiatan keagamaan.
 5. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral di bidang kewaspadaan diri.
 6. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.
- c. Permasalahan pada bidang politik dalam negeri :
1. Masih rendahnya tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
 2. Masih terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda
 3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan Orkemas.
 4. Belum terhimpun seluruh data Orkemas dan Partai Politik, di Kabupaten Lima Puluh Kota

5. Kurangnya kesadaran pengurus Partai Politik penerima bantuan keuangan Partai Politik dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Belum maksimal pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik di Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap:
 - a. Pelaksanaan Pemilu (Pemilu Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah)
 - b. Situasi Politik lainnya (Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah, disharmonisasi antara kepala daerah dan DPRD, unjuk rasa).
 - c. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 ini terdiri dari beberapa Bab, sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Manusia/Personil, Isu Strategis/Permasalahan Utama Yang Dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan sistematika penulisan.
- II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, yang memuat Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
- III. Akuntabilitas Kinerja, yang memuat Metodologi Pengukuran capaian Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Capaian Kinerja, Analisis Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran dan Realisasi Anggaran.
- IV. Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Langkah Peningkatan di Masa Datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota, visi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah **Mewujudkan Lima Puluh Kota yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah** . Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 disusun untuk menunjang misi 1, yang diwujudkan dalam sejumlah program dan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2021, antara lain :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Disamping untuk menunjang misi 1, rencana strategis Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota menunjang misi 4, yang diwujudkan dalam program-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota, maka tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya kesadaran dan pemahaman nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme masyarakat.
 - b. Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - c. Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis.
 - d. Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
2. Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
 - b. Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
 - c. Meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - d. Meningkatkan tata kelola organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan kebijakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peringatan Peristiwa Bela Negara di 7 Titik peringatan.
2. Menyelenggarakan forum-forum komunikasi di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menyelenggarakan penyuluhan politik kepada masyarakat.
4. Melakukan monitoring perkembangan politik di Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Meningkatkan pengelolaan kepegawaian (penempatan dan pengembangan karir aparatur).
6. Penerapan reward dan punishment bagi aparatur berbasis kinerja.
7. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
8. Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adapun strategi yang diambil untuk menjalankan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperingati Peristiwa Bela Negara dan rangkaian peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Meningkatkan koordinasi terkait isu-isu strategis di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi.
4. Mewujudkan sistem dan budaya politik yang demokratis.
5. Meningkatkan keterpaduan dalam mengembangkan kapasitas dan manajemen aparatur.
6. Meningkatkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang efektif , efisien dan akuntabel.
7. Meningkatkan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja aparatur.
8. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
9. Meningkatkan kompetensi aparatur.
10. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 46/BKBP-LK/2018 Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016-2021

Tabel 2.1
IKU Kesbangpol

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	$\frac{\text{Jumlah Hari Besar Nasional yang diperingati}}{\text{Jumlah Hari Besar Nasional yang harus diperingati}} \times 100 \%$	Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwa di Kabupaten Lima Puluh Kota	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
2.	Meningkatnya Keamanan, Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi penyelesaian Konflik Sosial pada tahun } n}{\text{Jumlah fasilitasi penyelesaian Konflik Sosial pada tahun } n} \times 100 \%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian	Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat
		Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras	$\frac{\text{Jumlah pengguna tahun } n - \text{Jumlah Pengguna tahun } n-1}{\text{Jumlah pengguna tahun } n-1} \times 100 \%$	BNN Kota Payakumbuh, Kepolisian	
3.	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pemilu	$\frac{\text{Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih pada pelaksanaan Pileg}}{\text{Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT Pileg}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih pada pelaksanaan Pilpres}}{\text{Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT Pilpres}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih pada pelaksanaan Pemilu}}{\text{Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilu}} \times 100 \%$	KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Bidang Politik Dalam Negeri

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, berikut ini disampaikan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dan evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2021. Berikut ini adalah Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat, dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan peringatan hari besar nasional.
2. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat	Persentase pelaksanaan peringatan hari besar nasional	100%
2.	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota	95%
		Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras	4%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	141.446.900,-
2.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	512,178,100,-
3.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	570,551,500,-
	TOTAL	1.224.176.500,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk pengukuran kinerja digunakan metode pengukuran yang membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian kinerja yang dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan /kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Kualifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	91% - 100%	Sangat Tinggi
2.	76% - 90%	Tinggi
3.	66% - 75%	Sedang
4.	51% - 65%	Rendah
5.	< 50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian	Predikat
1.	Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat	Persentase pelaksanaan peringatan hari besar nasional	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	100%	105,2%	Sangat Tinggi
		Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras	-4%	16,67%	-20,67%	Sangat Rendah
Rata-rata Capaian Indikator kinerja					61,51%	Tinggi

Dari tabel hasil pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 diatas dapat kita simpulkan bahwa klaifikasi penilaian

sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah 61,51% dengan predikat rendah.

Dalam rangka pemenuhan rekomendasi APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Nomor 700/106/Insp-LK/LHE/X/2021 tanggal 12 Oktober Tahun 2021, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Akan menyetarakan dokumen Renstra dengan RPJMD .
2. Akan melaksanakan review dokumen Renstra secara berkala.
3. Akan memanfaatkan rencana aksi dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
4. Akan memanfaatkan perjanjian kinerja untuk penyusunan identifikasi kinerja pada tingkat eselon III dan IV.

B. Pengukuran Kinerja

1. Akan meningkatkan mekanisme dan pengumpulan data kinerja.
2. Akan memanfaatkan IKU dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran.
3. Akan melaksanakan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara bulanan, triwulan dan tahunan.
4. Akan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja.
5. Akan memonitor pencapaian target kinerja.
6. Akan mengaitkan hasil pengukuran kinerja dengan reward dan punishment.
7. IKU akan direview secara berkala

C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja akan menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang menyajikan informasi tentang upaya efisiensi yang dilakukan, yang mengarah pada efisiensi yang telah dikuantifikasikan.
2. Laporan kinerja akan menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
3. Akan menyajikan laporan kinerja yang berdasarkan data.
4. Akan menyajikan informasi yang akan digunakan dalam perbaikan perencanaan dan akan digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

D. Evaluasi Internal

1. Akan melakukan evaluasi program dengan baik.
2. Evaluasi program akan memberikan rekomendasi peningkatan kinerja.
3. Akan dilaksanakan pemantauan rencana aksi secara bulanan dan penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif yang dilakukan.
4. Akan menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk Langkah-langkah yang nyata.
5. Akan menindaklanjuti hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

1. Akan membuat revisi target dalam PK apabila terjadi pergeseran/pengurangan anggaran.
2. Akan menyempurnakan informasi mengenai kinerja.

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2021 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1	Persentase pelaksanaan peringatan hari besar nasional		7 titik	7 titik	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dalam rangka menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditingkatkan kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Kalangan Masyarakat. Pengaruh globalisasi dan teknologi membawa dampak yang signifikan terhadap wawasan kebangsaan dan semangat persatuan dan kesatuan serta semangat bela negara di masyarakat. Dewasa ini pada masyarakat kita terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Makin mudarnya rasa berbangsa dan bernegara.
- b. Makin menurunnya moral generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

- d. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan Bangsa.
- e. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral Bangsa.

Pencapaian target kinerja pada Tahun 2021 adalah persentase pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional di 3 (tiga) titik Peringatan Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

- a. Peringatan Peristiwa Gugurnya 9 (Sembilan) Syuhada (BNPK) di Titian Dalam Nagari Pandam Gadang tanggal 10 Januari 1949, yang diperingati di Titian Dalam Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Tanggal 10 Januari 2020.

Gambar 3.1

PERINGATAN GUGURNYA 9 SYUHADA TAHUN 2021 DI TITIAN
DALAM NAGARI PANDAM GADANG KECAMATAN GUNUANG OMEH



Gambar 3.2

PERINGATAN GUGURNYA 9 SYUHADA TAHUN 2021 DI TITIAN
DALAM NAGARI PANDAM GADANG KECAMATAN GUNUANG OMEH



Gambar 3.3

PERINGATAN GUGURNYA 9 SYUHADA TAHUN 2021 DI TITIAN DALAM NAGARI
PANDAM GADANG KECAMATAN GUNUANG OMEH



Gambar 3.4

PERINGATAN GUGURNYA 9 SYUHADA TAHUN 2021 DI TITIAN DALAM NAGARI
PANDAM GADANG KECAMATAN GUNUANG OMEH



Gambar 3.5

Peringatan Peristiwa Situjuah



Gambar 3.6

Peringatan Peristiwa Situjuah



Gambar 3.7

Peringatan Peristiwa Situjuah



Gambar 3.8

Peringatan Peristiwa Situjuah



Gambar 3.9

Peringatan Peristiwa Situjuah



- b. Peringatan Peristiwa Konsolidasi Komando Sumatera dan Pembentukan Gubernur Militer, Bupati Militer dan Wedana Militer yang Menuju Koto Tinggi Tanggal 19 Desember 1948, yang dilaksanakan di Monumen Bela Negara di Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh pada tanggal 19 Desember 2020 sebagai Peringatan Hari Bela Negara.

Gambar 3.10
Peringatan Hari Bela Negara



Gambar 3.11
Peringatan Hari Bela Negara



Gambar 3.12
Peringatan Hari Bela Negara

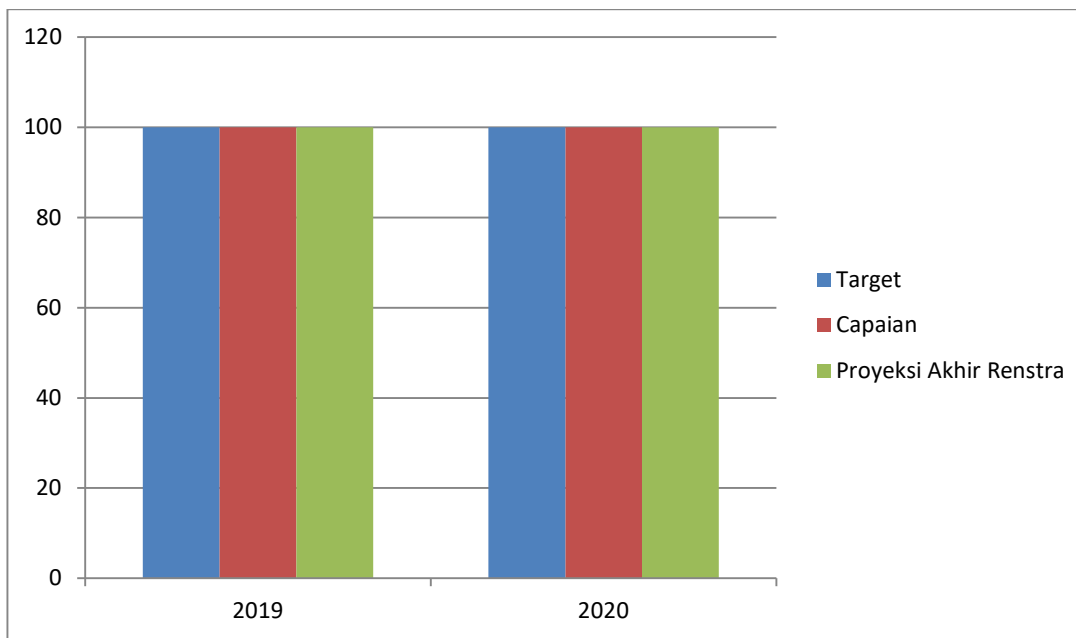


Gambar 3.13
Peringatan Hari Bela Negara



1.a. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat adalah sebagai berikut:



Pada Tahun 2020 target persentase pelaksanaan peringatan hari besar Nasional 100% dengan realisasi 100%. Sedangkan pada Tahun 2021 target 100% terealisasi 100%. Hal ini disebabkan oleh karena :

- Tingginya partisipasi masyarakat dalam rangka peringatan peristiwa sejarah dalam rangka hari bela Negara yang dilaksanakan di 7(tujuh) titik Peringatan Peristiwa PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Kerja sama yang baik dengan FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, juga dengan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari serta Tokoh Masyarakat.

1.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga kegiatan berjalan lancar.

1.c. Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya koordinasi dan kerjasama dengan KesbangPol Provinsi Sumatera Barat, Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari, Tokoh Masyarakat yang ada di daerah dan instansi terkait lainnya sehingga permasalahan yang ada di lapangan segera dapat diatasi.

- Program yang mendukung sasaran Strategis Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat adalah Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran Rp. 141.446.900,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya keamanan , ketertiban dan kenyamanan masyarakat

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Targe t 2017	Realis asi 2017	Targ et 2018	Realis asi 2018	Targ et 2019	Realis asi 2019	Tar get 2020	Realis asi 2020	Targ et 2021	Realis asi 2021	Ke t
1	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota		3 kali	1 kali	51%	100%	95%	100%	95%	100%	95%	100%	
2.	Persentasi Penurunan Jumlah Pengguna Narkoba dan Minuman Keras		10%	9,38%	-7%	+30,43 %	-6%	+4,34%	-5%	-8,3%	-4%	16,67%	

Keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan stabilitas politik dalam negara serta persatuan dan kesatuan bangsa yang sangat diperlukan dalam pembangunan. Tanpa stabilitas politik dalam negeri serta persatuan dan kesatuan bangsa akan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.

Konflik sosial adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu sangatlah penting dilaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi di tengah masyarakat, karena apabila tidak diselesaikan akan dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat yang akan menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dan politik, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan.

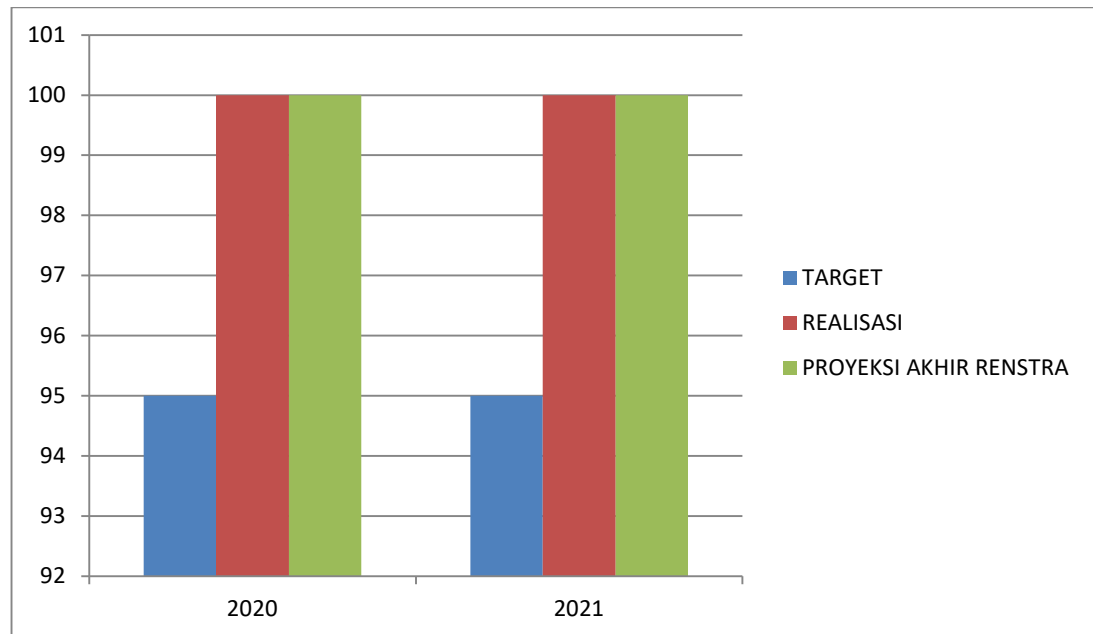
2.1. Persentase Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota

Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik sebagai berikut :

- a. Persoalan Alek Pangulu di Nagari Sungai Kamuyang yang belum bisa dilaksanakan karena masih adanya persoalan terkait dengan Limbago Adat yang belum duduk dan juga adanya masalah lain yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari) bersama unsur terkait lainnya).
- b. Adanya kelompok pengajian oleh Yayasan Faiz Albaqorah yang berasal dari Batam yang melakukan pengajian di Nagari Mungo yang diduga dan disinyalir ada kejanggalan sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dan hal ini telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Tim PAKEM Kabupaten Lima Puluh Kota Bersama dengan MUI dan Kemenag Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.1.a. Analisis Penyebab Keberhasilan dan kegagalan

Capaian Sasaran strategis Meningkatnya keamanan , ketertiban dan kenyamanan masyarakat adalah sebagai berikut:



Capaian Sasaran strategis Meningkatnya keamanan , ketertiban dan kenyamanan masyarakat dengan indikator kinerja persentase penyelesaian konflik sosial pada tahun 2020 target sebesar 95% dan realisasi 100%, sedangkan pada tahun 2021 target 95% dan realisasi 100%, hal ini disebabkan oleh karena:

- Fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berhasil dengan baik karena adanya kerja sama yang baik dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, aparatur pemerintahan Kecamatan , Nagari ,dan Wali Jorong.

2.1.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga kegiatan berjalan lancar.

2.1.c. Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena karena adanya koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Nagari dan Jorong, dan instansi terkait lainnya sehingga permasalahan yang ada di lapangan segera dapat diatasi.
- Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan keamanan , ketertiban dan kenyamanan masyarakat adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 512.178.100,-

2.2. Persentase Penurunan Jumlah Pengguna Narkoba dan Minuman Keras.

Pada Tahun 2021 Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras ditargetkan menurun 4% dari Tahun 2020, tapi tidak tercapai, dimana terjadi penurunan kasus penggunaan narkoba dan minuman keras di tahun 2020 yaitu dari 42 kasus dan di Tahun 2021 menjadi 49 kasus, dimana terjadi peningkatan jumlah kasus pengguna narkoba dan minuman keras sebesar 16,67%. Dalam rangka penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan/penggunaan minuman keras dan narkoba.

Gambar 3.14
Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di
Kecamatan Harau



Gambar 3.15
Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di
Kecamatan Harau



Gambar 3.16
Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di
Kecamatan Harau



Gambar 3.17
Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di
Kecamatan Harau



Gambar 3.18
Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di
Kecamatan Guguak



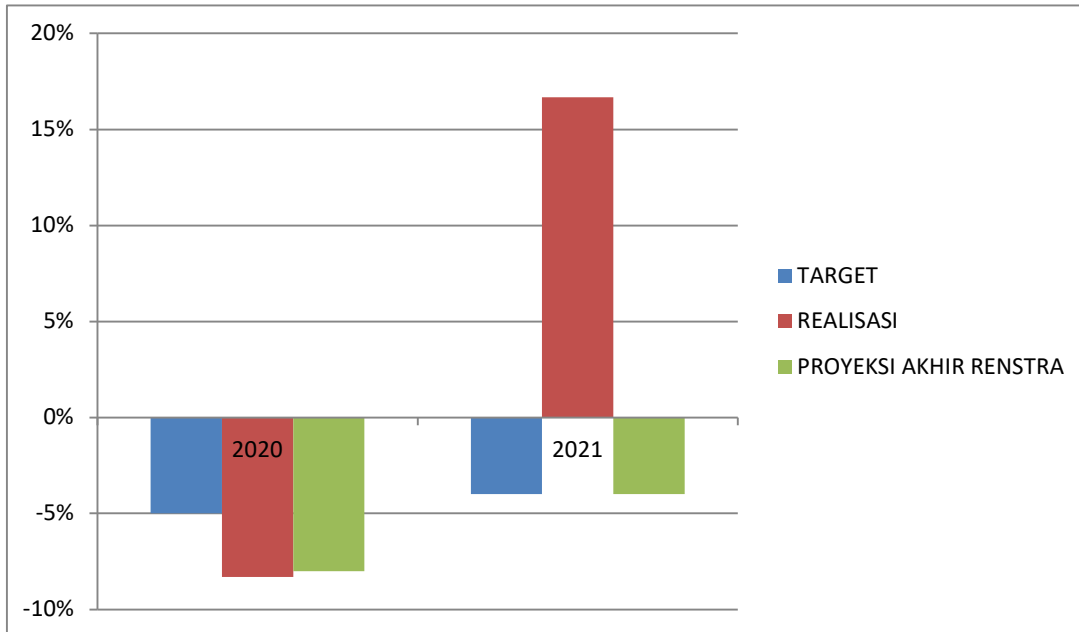
Gambar 3.19
Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di
Kecamatan Guguk



Gambar 3.20
Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di
Kecamatan Guguk



2.2.a. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan



- Penurunan persentase jumlah pengguna narkoba dan minuman keras tidak dapat tercapai karena beberapa faktor diantaranya adalah :
 1. Terbatasnya dana untuk penyuluhan narkoba kepada masyarakat, dimana hanya 25 (dua puluh) lima orang perkecamatan.
 2. Semakin canggihnya modus operandi sindikat dan penyelundup narkoba.
 3. Faktor geografi dari Negara Indonesia yang menyebabkan masih belum optimalnya pengawasan.
 4. Faktor kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dimana salah satunya disebabkan oleh gaya hidup konsumtif.
 5. Sanksi hukum yang belum memberikan efek jera bagi pengguna maupun pengedar narkoba dan minuman keras.

2.2.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga kegiatan berjalan lancar.

2.2.c. Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya koordinasi dan kerjasama dengan Polres Kabupaten Lima Puluh Kota, Polres Payakumbuh, BNN Kota Payakumbuh, Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan instansi terkait lainnya sehingga permasalahan yang ada di lapangan segera dapat diatasi.
- Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran Rp. 570.551.500,-

D. ANALISIS EFISIENSI DALAM PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2021, jumlah anggaran belanja adalah Rp. 5.516.570,036,- dengan realisasi keuangan Rp. 5,067,323,784 (91,86 %), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

Adapun realisasi fisik dan keuangan tiap programnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Ket
			Keuangan (Rp.)	(%)	Fisik (%)	
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.099.730.310,-	3.039.108.432,-	98,04	100%	Efisien
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.260.000,-	6.224.000,-	99,42	100%	efisien
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.630.600,-	4.606.000,-	99,47	100%	efisien
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.459.700,-	3.584.000,-	65,64	100%	efisien
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.100.200,-	4.095.000,-	99,87	100%	efisien
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.070.000,-	2.604.000,-	84,82	100%	efisien
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.661.800,-	3.659.000,-	99,92	100%	efisien
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.909.000,-	4.349.000,-	88,59	100%	efisien
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.630.600,-	4.606.000,-	99,47	100%	efisien
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.452.887.910,-	2.446.822.829,-	99,75	100%	efisien
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.429.660.910,-	2.427.750.829,-	99,92	100%	efisien
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	3.845.500,-	2.121.000,-	55,16	100%	efisien

	Keuangan SKPD					
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.956.300,-	2.236.000,-	75,64	100%	efisien
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.190.900,-	12.710.000,-	89,56	100%	efisien
1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.234.300,-	2.005.000,-	89,74	100%	efisien
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.870.000,-	2.947.000,-	76,15	100%	Efisien
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.870.000,-	2.947.000,-	76,15	100%	efisien
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.959.100,-	214.974.614,-	93,89	100%	efisien
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.474.000,-	5.046.000,-	92,18	100%	efisien
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.230.900,-	29.036.000,-	99,33	100%	efisien
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.166.200,-	14.029.500,-	92,51	100%	efisien
1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.500.000,-	11.932.500,-	72,32	100%	efisien
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.588.000,-	154.930.614,-	95,29	100%	efisien
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.200.000,-	39.450.000,-	77,05	100%	efisien
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.200.000,-	39.450.000,-	77,05	100%	efisien
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.513.000,-	144.512.989,-	94,14	100%	efisien
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.840.000,-	3.050.000,-	79,43	100%	efisien
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.992.000,-	13.434.989,-	70,74	100%	efisien
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.681.000,-	128.028.000,-	97,97	100%	efisien
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.209.000,-	161.280.000,-	91,01	100%	efisien
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	155.061.000,-	142.112.500,-	91,65	100%	efisien

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.020.000,-	4.040.000,-	57,55	100%	efisien
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.128.000,-	15.127.500,-	100,00	100%	efisien
2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	263.857.500,-	240.253.000,-	91,05	100%	efisien
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	263.857.500,-	240.253.000,-	91,05	100%	efisien
2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	122.410.600,-	111.842.000,-	91,37	100%	efisien
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	141.446.900,-	128.411.000,-	90,78	100%	efisien
3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.005.283.526,-	1.003.251.641,-	99,80	100%	efisien
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.005.283.526,-	1.003.251.641,-	99,80	100%	efisien
3.1.1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	28.047.200,-	27.272.000,-	97,24	100%	efisien

	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah					
3.1.2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	970.948.926,-	969.845.141,-	99,89	100%	efisien
3.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6.287.400,-	6.134.500,-	97,57	100%	efisien
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	64.969.100,-	64.671.000,-	99,54	100%	efisien
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	64.969.100,-	64.671.000,-	99,54	100%	efisien
4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	64.969.100,-	64.671.000,-	99,54	100%	efisien
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	570.551.500,-	434.525.811,-	76,16	100%	efisien
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	570.551.500,-	434.525.811,-	76,16	100%	efisien

	Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					
5.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	570.551.500,-	434.525.811,-	76,16	100%	efisien
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	512.178.100,-	285.513.900,-	55,75	100%	efisien
6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	512.178.100,-	285.513.900,-	55,75	100%	efisien
6.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	171.383.400,-	153.388.900,-	89,50	100%	efisien
6.1.2	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	340.794.700,-	132.125.000,-	38,77	100%	efisien

E. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	DPA (Rp)	DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase	Ket
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.475.017.263,-	3.099.730.310,-	3.039.108.432,-	98,04	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.369.500,-	6.260.000,-	6.224.000,-	99,42	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.552.200,-	4.630.600,-	4.606.000,-	99,47	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.001.900,-	5.459.700,-	3.584.000,-	65,64	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.085.100,-	4.100.200,-	4.095.000,-	99,87	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.040.300,-	3.070.000,-	2.604.000,-	84,82	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.010.300,-	3.661.800,-	3.659.000,-	99,92	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.195.200,-	4.909.000,-	4.349.000,-	88,59	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.484.500,-	4.630.600,-	4.606.000,-	99,47	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.553.595.663,-	2.452.887.910,-	2.446.822.829,-	99,75	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.527.804.663,-	2.429.660.910,-	2.427.750.829,-	99,92	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.307.800,-	3.845.500,-	2.121.000,-	55,16	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.278.200,-	2.956.300,-	2.236.000,-	75,64	
1.2.4	Koordinasi dan	5.182.200,-	14.190.900,-	12.710.000,-	89,56	

	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					
1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.022.800,-	2.234.300,-	2.005.000,-	89,74	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4,759,900	3,870,000	2,947,000	76,15	
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,759,900	3,870,000	2,947,000	76,15	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.500.000,-	0	0	0	
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	19.500.000,-	0	0	0	
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.000.000,-	0	0	0	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	318.781.400,-	228.959.100,-	214.974.614,-	93,89	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.664.000,-	5.474.000,-	5.046.000,-	92,18	
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.078.700,-	29.230.900,-	29.036.000,-	99,33	
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.125.200,-	15.166.200,-	14.029.500,-	92,51	
1.5.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.500.000,-	16.500.000,-	11.932.500,-	72,32	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.413.500,-	162.588.000,-	154.930.614,-	95,29	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.560.000,-	51.200.000,-	39.450.000,-	77,05	
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	40.000.000,-	0	0		
1.6.2	Pengadaan Mebel	8.610.000,-	0	0		
1.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.950.000,-	51.200.000,-	39.450.000,-	77,05	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.788.800,-	153.513.000,-	144.512.989,-	94,14	

1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.840.000,-	3.840.000,-	3.050.000,-	79,43	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.092.000,-	18.992.000,-	13.434.989,-	70,74	
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.856.800,-	130.681.000,-	128.028.000,-	97,97	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.662.000,-	177.209.000,-	161.280.000,-	91,01	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	172.290.000,-	155.061.000,-	142.112.500,-	91,65	
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.880.000,-	7.020.000,-	4.040.000,-	57,55	
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.492.000,-	15.128.000,-	15.127.500,-	100,00	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	433.738.400,-	433.738.400,-	263.857.500	91,05	
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	433.738.400,-	433.738.400,-	263.857.500,-	91,05	
2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	184.448.000,-	122.410.600,-	111.842.000,-	91,37	
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	249.290.400,-	141.446.900,-	128.411.000,-	90,78	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN	1.066.104.726,-	1.005.283.526,-	1.003.251.641,-	99,80	

	PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.066.104.726,-	1.005.283.526,-	1.003.251.641,-	99,80	
3.1.1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	67.747.200,-	28.047.200,-	27.272.000,-	97,24	
3.1.2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	986.683.226,-	970.948.926,-	969.845.141,-	99,89	
3.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	11.674.300,-	6.287.400,-	6.134.500,-	97,57	

	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	110.517.900,-	64.969.100,-	64.671.100,-	99,54	
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	110.517.900,-	64.969.100,-	64.671.000,-	99,54	
4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	110.517.900,-	64.969.100,-	64.671.000,-	99,54	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	661.418.200,-	570.551.500,-	434.525.811,-	76,16	
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	661.418.200,-	570.551.500,-	434.525.811,-	76,16	
5.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	661.418.200,-	570.551.500,-	434.525.811,-	76,16	

6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	747.808,300,	512.178.100,-	285.513.900,-	55,75	
6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	747.808.300,-	512.178.100,-	285.513.900,-	55,75	
6.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	196.341.600,-	171.383.400,-	153.388.900,-	89,50	
6.1.2	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	551.466.700,-	340.794.700,-	132.125.000,-	38,77	
	JUMLAH	6.494.604.789,-	5.516.570.036,-	5.067.323.784,-	91,86	

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai penyelenggaraan pelayanan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik perlu bekerjasama dengan instansi terkait dan dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari Instansi Vertikal seperti Polres, Kodim, Kemenag, Kejaksaan, Kantor Imigrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan pengawas Pemilu Kabupaten Lima Puluh Kota, dan lain-lain maupun dukungan dari instansi lainnya (Badan, Setwan, Dinas, Bagian, Kecamatan dan Nagari).

Mengingat dana yang dialokasikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sangat terbatas, walaupun oleh Kementerian Dalam Negeri sudah harus dilaksanakan oleh daerah, tapi sampai saat ini kegiatan tersebut belum bias dilaksanakan. Kegiatan tersebut adalah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).

B. LANGKAH PENINGKATAN DI MASA DATANG

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota pada masa yang akan datang, maka diharapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perlunya staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelatihan dan bimbingan teknis yang diadakan, baik oleh Pemerintah, maupun lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas dari kompetensi dari staf, sehingga dapat melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- b. Perlunya tambahan kendaraan dinas/operasional untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, karena pada saat ini kendaraan dinas roda empat sangat terbatas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan hal ini sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya kegiatan yang dilakukan di Nagari dan Kecamatan.
- c. Perlunya dukungan dana yang layak untuk melaksanakan program dan kegiatan yang belum terlaksana, terutama kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.
- d. Perlunya tambahan personil yang mempunyai keahlian khusus (keahlian pengadaan barang dan jasa, akuntansi), sehingga tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat terlaksana dengan baik.

Payakumbuh, Februari 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



H. JONI AMIR, S.Sos, M.M
NIP. 19650619 199003 1003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERMAN AZMAR, AP, M. Si
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO
Jabatan : BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, November 2021

PIHAK KEDUA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

PIHAK PERTAMA

HERMAN AZMAR, AP, M. Si
Pembina Utama Muda (IV.c) /
NIP. 197309131993111001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2021


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat	1. Persentase pelaksanaan peringatan hari besar nasional	100%
2	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	2. Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota	95%
		3. Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras	4%

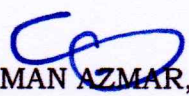
No	Program	Anggaran (Rp)
1	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	141.446.900,-
2	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	512.178.100,-
3	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	570.551,500-
TOTAL		1.224.176.500,-

Payakumbuh , November 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO


HERMAN AZMAR, AP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c) /
NIP. 197309131993111001